

**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KABUPATEN LEBAK**

Disusun Oleh:

NAMA : BAIHAKI
NPM : 2241021036
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI: ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, suri teladan terbaik, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Selama proses penulisan tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini menulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si, selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dengan penuh kesabaran dalam penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si selaku pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan tesis ini.
3. Lienda Yanti (istri tercinta), Mutia, Nayla dan Nabil (anak-anak terkasih), terima kasih atas doa, dukungan, dan pengertiannya selama ayah menempuh pendidikan ini.
4. Bunda Mardiyah tercinta, Bapak Dadang Sopandi dan Ibu Hendayati (Bapak dan Ibu mertua), terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang tidak pernah putus yang selalu dicurahkan untukku.
5. Teman-teman MKP Angkatan 2022, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini, semoga kalian semua diberikan kesuksesan dalam karier dan kebahagiaan dalam hidup ini.
6. Mbak Nia, Mbak Risna, Pak Yanka dan rekan-rekan lainnya di Keasdepan Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro yang telah membantu dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan penelitian.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak selama menimba ilmu di Manajemen Kebijakan Publik STIA LAN Jakarta maupun selama penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus kepada kita semua. Aamiin.

Jakarta, Juni 2026



Penulis

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Baihaki
NPM : 2241021036
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Lebak

Telah mempertahankan tesis di depan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juni 2026
Pukul : 14.30 s.d 15.30

TELAH DINYATAKAN LULUS

PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA
Sekretaris : Dr. Ridwan Rajab, M.Si
Anggota : Dr. Alih Aji Nugroho, MPA
Anggota/
Pembimbing 1 : Dr. Edy Sutrisno, M.Si
Anggota/
Pembimbing 2 : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si



Four handwritten signatures are present, each corresponding to one of the examiners listed on the left. The signatures are written in blue ink over a circular official stamp of Politeknik STIA LAN Jakarta.

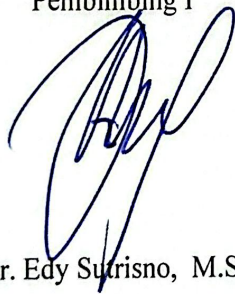
**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Nama : Baihaki
NPM : 2241021036
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Lebak
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Implementation Strategy of Product Packaging Development Policy for Micro and Small Enterprises in Lebak Regency*

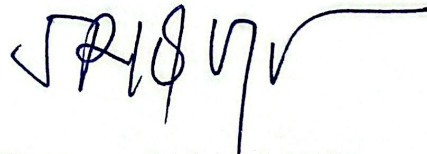
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Edy Sutrisno, M.Si)

Pembimbing II



(Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Baihaki
NPM : 2241021036
Program Studi : Administrasi Publik
Jurusan : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Lebak” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus **bersedia menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan

Jakarta, Juni 2026
Penulis,


Baihaki
NPM. 2241021036

ABSTRAK

Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Lebak

Baihaki, Edy Sutrisno, Neneng Sri Rahayu
baihaki234@gmail.com

Penelitian ini membahas strategi implementasi kebijakan pengembangan kemasan produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Lebak melalui Rumah Kemasan SINTESA. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kualitas kemasan dalam meningkatkan daya saing produk UMK, sementara pelaksanaan layanan kemasan di Kabupaten Lebak masih menghadapi berbagai hambatan operasional dan kelembagaan. Kabupaten Lebak dipilih sebagai lokus penelitian karena telah menerima Program Pengembangan Kemasan Produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun 2024, tetapi keberlanjutan layanan masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, tata kelola, dan model operasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan serta merumuskan strategi implementasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Rumah Kemasan SINTESA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner pendukung. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal terutama karena keterbatasan bahan baku, tinta, pemeliharaan mesin, dukungan operasional, kapasitas SDM teknis, serta struktur birokrasi yang belum cukup fleksibel untuk mengelola layanan berkarakter semi-bisnis. Komunikasi dan disposisi pelaksana relatif mendukung, tetapi belum cukup menjamin keberlanjutan layanan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, penetapan SOP operasional, kepastian pembiayaan, pengelolaan bahan baku, pemeliharaan mesin, dan pengembangan kemitraan dengan mitra rumah kemasan swasta yang telah berkembang dan memiliki jejaring.

Kata kunci: implementasi kebijakan, kemasan produk, UMK, Rumah Kemasan SINTESA, Edward III.

ABSTRACT

Implementation Strategy of Product Packaging Development Policy for Micro and Small Enterprises in Lebak Regency

Baihaki, Edy Sutrisno, Neneng Sri Rahayu
baihaki234@gmail.com

This study examines the implementation strategy of the product packaging development policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) in Lebak Regency through Rumah Kemasan SINTESA. The study is motivated by the importance of packaging quality in improving the competitiveness of MSE products, while the implementation of packaging services in Lebak Regency still faces operational and institutional challenges. Lebak Regency was selected as the research locus because it received the Product Packaging Development Program for MSEs through the 2024 Co-Administration Fund, yet the sustainability of the service still requires strengthening in resources, governance, and operational models. This study aims to analyze the factors causing the suboptimal implementation of the policy and to formulate implementation strategies to improve the effectiveness and sustainability of Rumah Kemasan SINTESA. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, document study, and supporting questionnaires. The analysis refers to Edward III's policy implementation theory, consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that policy implementation has not been optimal, mainly due to limitations in raw materials, ink, machine maintenance, operational support, technical human resources, and a bureaucratic structure that is not yet sufficiently flexible to manage a semi-business public service. Communication and implementer disposition are relatively supportive, but they are not sufficient to ensure service sustainability. This study recommends institutional strengthening, establishment of operational SOPs, certainty of financing, raw material management, machine maintenance, and partnership development with established private packaging houses that have broader technical and business networks

Keywords: policy implementation, product packaging, micro and small enterprises, Rumah Kemasan SINTESA, Edward III.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	21
C. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian	22
E. Manfaat Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Penelitian Terdahulu	25
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	31
1. Tinjauan Kebijakan	31
2. Tinjauan Teoritis	37
3. Konsep Kunci/Operasionalisasi Kunci	50
C. Kerangka Berpikir	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57
A. Pendekatan Penelitian	57
B. Teknik Pengumpulan Data	60
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	62
D. Prosedur Validasi Model Kebijakan	64
E. Instrumen Penelitian	66

BAB IV HASIL PENELITIAN	67
A. Gambaran Umum.....	67
B. Hasil Penelitian	73
C. Analisis dan Pembahasan.....	99
 BAB V PENUTUP.....	 115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	118
 DAFTAR PUSTAKA	 123
Lampiran	

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data UMKM di Indonesia	1
Tabel 1.2 Daftar Rumah Kemasan Kementerian Perindustrian	5
Tabel 1.3 Pemerintah Daerah Penerima Program Tahun 2023	12
Tabel 1.4 Pemerintah Daerah Penerima Program Tahun 2024 Tahap I	13
Tabel 1.5 Pemerintah Daerah Penerima Program Tahun 2024 Tahap II	14
Tabel 1.6 Survei <i>Monitoring</i> Layanan Kemasan	15
Tabel 2.1 Tabel Komparatif Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep Kunci Penelitian	53
Tabel 2.3 Matriks Operasionalisasi Variabel Penelitian	47
Tabel 3.1 Fokus Penelitian dan Aspek Analisis	58
Tabel 3.2 <i>Key Informant</i> Penelitian	60
Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data	62
Tabel 3.4 Tahapan Pengolahan dan Analisis Data	63
Tabel 3.5 Tahapan Proses Validasi Model Kebijakan	65
Tabel 4.1 Rekapitulasi Produksi Kemasan UMK Rumah Kemasan SINTESA Lebak Tahun 2026	74
Tabel 4.2 Rekapitulasi Produksi Berdasarkan Jenis Kemasan/Layanan	75
Tabel 4.3 Tabel 4.3 Karakteristik Responden UMK Penerima Layanan	85
Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Kuesioner UMK Penerima Layanan	85
Tabel 4.5 Faktor Penyebab Tidak Optimalnya Kinerja Rumah Kemasan SINTESA Berdasarkan Edward III	85
Tabel 4.6 Strategi Implementasi Berdasarkan Temuan Penelitian	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kontribusi Ekspor UMKM di beberapa negara ASEAN	2
Gambar 1.2 Skema Pelaksanaan Program Pengembangan Kemasan UMK	9
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn	41
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier	42
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Grindle	45
Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Edward III	47
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir	56
Gambar 3.1 Analisis Data menurut Miles dan Huberman	63
Gambar 4.1 Gedung SINTESA UMKM	70
Gambar 4.2 Front Office	70
Gambar 4.3 Ruang Tunggu	71
Gambar 4.4 Ruang Konsultasi	71
Gambar 4.5 Ruang Pertemuan	71
Gambar 4.6 Struktur Organisasi Rumah Kemasan SINTESA Lebak	72
Gambar 4.7 Front Office Rumah Kemasan SINTESA Lebak	77
Gambar 4.8 Ruang Konsultasi dan Ruang Diskusi Layanan Kemasan	77
Gambar 4.9 Aktivitas Operator dalam Proses Produksi Kemasan	78
Gambar 4.10 Contoh Hasil Kemasan Produk UMK	79
Gambar 4.11 Rak Display Hasil Kemasan Produk UMK	79
Gambar 4.12 Ruang Bahan Baku Rumah Kemasan SINTESA	80
Gambar 4.13 Aktivitas Operator dalam Proses Produksi Kemasan	81
Gambar 4.14 Form Perintah Kerja Layanan Kemasan	82
Gambar 4.15 Profil Tenant Inkubator Bisnis SINTESA	82
Gambar 4.16 Diskusi lintas Stakeholder terkait Rumah Kemasan SINTESA	89
Gambar 4.17 Diskusi dengan Dinas Koperasi dan UKM Lebak	89
Gambar 4.18 Diskusi dengan Manajer Rumah Kemasan SINTESA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. UMKM tidak hanya menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan ekonomi lokal. Dalam banyak kondisi, UMKM mampu bertahan karena memiliki hubungan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal, serta relatif mudah beradaptasi terhadap perubahan pasar. Peran tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemberdayaan UMKM yang menempatkan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Berdasarkan data dari Kementerian UMKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59.519.650 unit, yang terdiri dari UMKM nonpertanian dan perikanan sebanyak 30.178.617 unit serta UMKM pertanian dan perikanan sebanyak 29.341.033 unit (Kementerian UMKM, 2025).

Tabel 1.1 Data UMKM di Indonesia

Kategori UMKM	Jumlah	Prosentase	Sumber
UMKM Non Pertanian dan Perikanan	30.178.617	50,7%	Sistem Informasi Data Tunggal, Kementerian UMKM
UMKM Pertanian dan Perikanan	29.341.033	49,3%	BPS (Sensus Pertanian 2023)
TOTAL	59.519.650	100%	

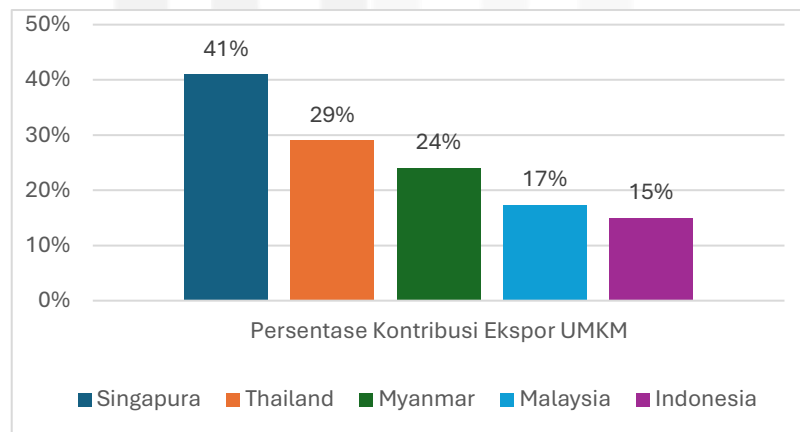
Sumber : Kementerian UMKM, 2025

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan kelompok usaha yang sangat besar dan memiliki posisi penting dalam struktur ekonomi nasional. Selain itu, UMKM juga berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto

(60%) dan penyerapan tenaga kerja nasional (97%). (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025),

Besarnya jumlah UMKM di Indonesia belum diikuti oleh peningkatan daya saing produk yang memadai. Salah satu indikator yang menunjukkan belum optimalnya daya saing UMKM Indonesia dapat dilihat dari kontribusi ekspor.

Gambar 1.1 Kontribusi Ekspor UMKM di beberapa negara ASEAN



Sumber : Kementerian Perdagangan, 2025

Kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih berada di bawah beberapa negara ASEAN. Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi ekspor UMKM Indonesia sebesar 15 persen, lebih rendah dibandingkan Singapura sebesar 41 persen, Thailand sebesar 29 persen, Myanmar sebesar 24 persen, dan Malaysia sebesar 17 persen (Kementerian Perdagangan, 2025; OECD, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa produk UMKM Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperluas pasar, terutama pada pasar yang menuntut kualitas, standar, legalitas, dan tampilan produk yang lebih baik.

Salah satu persoalan mendasar yang menjadi penyebab masih rendahnya daya saing produk UMKM adalah keterbatasan kualitas produk, termasuk kualitas kemasan. Kualitas kemasan produk menjadi penting karena kemasan saat ini tidak lagi hanya dipahami sebagai pembungkus produk, tetapi telah menjadi bagian dari strategi peningkatan nilai tambah, identitas merek, perlindungan produk, pemenuhan standar pasar, dan sarana komunikasi antara

produsen dengan konsumen. Dalam perspektif pemasaran, kemasan berperan sebagai atribut produk yang memengaruhi persepsi kualitas, diferensiasi, dan keputusan pembelian konsumen. Produk yang memiliki cita rasa, kualitas bahan, atau nilai lokal yang baik dapat kehilangan daya tarik ketika tidak didukung kemasan yang aman, informatif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik pasar. (Kotler & Keller, 2016; Klimchuk & Krasovec, 2013).

Produk yang dikemas secara sederhana cenderung sulit masuk ke pasar ritel modern, promosi digital, pameran, serta jaringan distribusi yang mensyaratkan legalitas dan informasi produk yang jelas. Kemasan juga berkaitan dengan kepercayaan konsumen. Produk pangan, minuman, herbal, kerajinan, dan produk lokal lainnya memerlukan kemasan yang dapat menjelaskan komposisi, berat bersih, tanggal produksi, izin edar, merek, halal, dan informasi produsen. Tanpa kemasan yang baik, produk UMK berpotensi dipersepsikan kurang profesional meskipun kualitas isi produknya memadai.

Banyak pelaku UMK yang telah menyadari pentingnya menggunakan kemasan yang menarik dan berkualitas untuk meningkatkan daya saing produk mereka, namun sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi keterbatasan modal, minimnya pengetahuan desain, sulitnya akses bahan baku kemasan, akses teknologi produksi, serta keterbatasan jaringan dengan penyedia jasa kemasan profesional. Sebagian besar UMK juga tidak bisa menggunakan kemasan yang sesuai keinginan konsumen karena tidak mampu memenuhi ketentuan minimum order dari percetakan komersial, dengan biaya yang relatif besar dan membutuhkan akses ke kota-kota tertentu yang memiliki fasilitas percetakan lengkap. (GEMA, 2021)

Mengingat masih rendahnya kualitas kemasan produk UMKM di Indonesia, pengembangan kemasan produk UMKM di Indonesia merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan nilai tambah produk UMKM di pasar lokal maupun global. Secara umum, kebijakan pengembangan kemasan produk UMKM diarahkan pada aspek keberlanjutan, inovasi kemasan ramah lingkungan, serta peningkatan kapasitas UMKM untuk

menghasilkan kemasan yang berkualitas melalui sosialisasi, edukasi, dan dukungan regulasi pemerintah.

Menghadapi banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM terkait kemasan produk, pemerintah merespons persoalan tersebut melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, fasilitasi desain, bantuan alat, serta pengembangan rumah kemasan atau layanan kemasan di daerah. Pemerintah juga mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan kemasan yang berkelanjutan melalui berbagai bentuk dukungan regulasi, sosialisasi, dan edukasi. Dukungan regulasi dapat berupa insentif fiskal, kebijakan standar kemasan ramah lingkungan, atau peraturan yang mendorong penggunaan bahan *biodegradable*.

Dalam konteks pengembangan kemasan berkelanjutan, rumah kemasan membantu UMKM mengakses teknologi kemasan terbaru, seperti penggunaan biopolimer, bahan alami yang dapat terurai, dan inovasi komposit yang meningkatkan sifat mekanik sekaligus menurunkan dampak lingkungan. Dengan begitu, rumah kemasan berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan produksi yang mendukung strategi *green packaging* yang kini menjadi fokus kebijakan keberlanjutan di Indonesia. Rumah kemasan juga berperan sebagai medium edukasi dan kolaborasi berbagai stakeholder agar strategi kemasan hijau dapat diadopsi secara luas di Indonesia (Misopoulos & Bajiraj, 2025).

1. Program Rumah Kemasan oleh Pemerintah

Program rumah kemasan oleh pemerintah pada awalnya diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Program ini bermula dari upaya Kemenperin untuk mengatasi kelemahan UKM dalam desain dan produksi kemasan yang sering kali kurang menarik atau tidak memenuhi standar, sehingga menghambat pemasaran produk. Program rumah kemasan dirancang untuk mendukung UMKM dalam meningkatkan kualitas kemasan produk. Kemasan dianggap sebagai elemen krusial yang tidak hanya melindungi produk, tetapi juga berperan dalam promosi, daya saing, dan akses pasar global. (GEMA 2021)

Program rumah kemasan Kemenperin diawali pada tahun 2003, ketika Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) mendirikan Klinik Pengembangan Desain Merek dan Kemasan (KDMK) di Jakarta. Klinik ini berfungsi sebagai pusat informasi, konsultasi, dan fasilitasi desain kemasan untuk IKM di seluruh Indonesia. Kemudian, pada tahun 2007, Rumah Kemasan dibangun di Kota Bandung sebagai implementasi langsung dari klinik tersebut. (GEMA, 2021).

Sejak peluncurannya, program rumah kemasan oleh Kemenperin terus berkembang dengan ekspansi ke berbagai daerah. Saat ini, terdapat sekitar 46 rumah kemasan yang difasilitasi Kemenperin yang tersebar di Indonesia, bekerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah. (Kemenperin, 2025)

Tabel 1.2 Daftar Rumah Kemasan Kementerian Perindustrian

No.	Nama	Alamat
1	Rumah Kemasan Prov. Sulawesi Utara	Jln. Tololiu Supit - Teling Tingkulu, Wanea, Manado
2	UPTD Rumah Kreatif Disperindag Prov. Bali	Jl. Raya Puputan 108 Denpasar, Bali
3	Rumah Kemasan Kab. Tuban	Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 32 Tuban, Jawa Timur
4	Rumah Kemasan NTT	Jl. W.J. Lamentik, Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
5	Rumah Kemasan Diskopurindag Maros	Jl. Gladiol No.1, Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, Sulawesi Selatan 90011
6	Rumah Kemasan Kota Banjarmasin	Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Komplek Meranti No.55 RT.36, Alalak Utara, Banjarmasin Utara
7	UPT Industri Makanan, Minuman Dan Kemasan Dinas Perindag Prov. Sulsel	Jl. Sultan Alauddin No.195 Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini Kota Makassar Prov. Sulsel
8	Rumah Pengembangan Produk	Desa Namang, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah, Bangka Belitung
9	Rumah Kemasan Kab. Kotabaru	Jl. Brigjend H. Hasan Basri No.29a, Semayap, Pulau Luat utara, Kab. Kotabaru, Kalsel
10	Rumah Kemasan Pandeglang	Jl. Raya Labuan KM.5, Cipacung Desa Palurahan, Kec. Kaduhejo, Pandeglang, Banten
11	Rumah Kemasan Padang	Jl. Flamboyan Belakang Kantor Camat Koto Tangah Padang Sumatera Barat
12	Klinik Kemasan Dinas Perindag Kab. Bandung	Jl. Raya Soreang KM 17, Pamekaran, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat
13	Rumah Kemasan Magetan Disperindag Magetan	Jl. Tripanita No 17, Kab. Magetan, Jawa Timur

No.	Nama	Alamat
14	Rumah Kemasan Banjarbaru	Jl. Panglima Batur Barat No. 08, Kota Banjarbaru, Kalsel
15	Rumah Kemasan Batu Bara	Jl. Jendral Sudirman, Indrapura, Air Putih, Kab. Batu Bara, Sumatera Utara
16	Rumah Kemasan Batu	Jl. Abdul Gani Atas No.2, Ngaglik, Kota Batu, Malang, Jawa Timur
17	Rumah Kemasan Ambon	Jl. Upua Baguala, Negeri Passo, Kota Ambon, Maluku
18	Rumah Kemasan Mitra Hebat	Lingkungan V, Kel. Wawali Pasa, Kec. Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara
19	Rumah Kemasan Kab. Probolinggo	Jl. Ahmad Yani 23, Kantor DKUPP Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Jawa Timur
20	UPT Sentra IKM Pangan	Jl. Lintas Sumatra km 13 Kec.Kulim, Pekanbaru, Riau
21	Rumah Kemasan Hasanah	Jl. A Yani, Kel. Kampung Baru, Kec.Simpang Empat Batulicin, Kab.Tanah Bumbu, Kalsel
22	Klinik Desain Merek Kemas Kemenperin	Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Ja-Sel Lt. 15
23	UPT Textile Dan Kemasan Prov. Sumsel	Jl. Demang Lebar Daun No. 2610 Palembang
24	UPTD PTSI Disperindag Banten	Jl. Ciwaru Raya No.57 Cipare Kec. Kota Serang, Kota Serang - Banten
25	Rumah Kemasan Ngawi	Jl. Supriyadi, Dsn. Nglarangan, Desa Karangasri, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur
26	UPTD Rumah Kemasan Aceh	Jl. Pocut Baren No. 11 Banda Aceh, Aceh
27	Pondok Desain Dan Promosi Kota Padang Panjang	Jl. Kamarullah Bukit Surungan, Padang Panjang
28	Rumah Kemasan Kab. Tanah Datar	Jl. Datuah Bandaro Kuniang No. 43B, Kuburajo Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat
29	UPTD Kemasan Kota Jambi	Terminal Angkutan Bongkar Muat, Jl. Lingkar Barat Paal X, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi
30	Rumah Kemasan Kab. Banjar	Jl. Perwira No.44G, Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
31	UPTD Pelatihan Koperasi Kalimantan Timur	Jl. D.I. Panjaitan No. 3 Samarinda, Kaltim
32	UPTD Balai Kemasan Produk Daerah Prov. NTB	Jl. Langko No. 67 Mataram, Nusa Tenggara Barat
33	UPT Pengembangan Produk Pangan Dan Kerajinan Sulawesi Tengah	Jl. Kartini No. 18, Palu, Sulawesi Tengah
34	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jl. Kusumanegara No.168, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta

No.	Nama	Alamat
35	UPTD Rumah Promosi Dan Kemasan Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Jl. Depati Amir Jl. Mentok No.203, Kec. Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
36	Klinik Kemasan Kepulauan Riau	Jl. Yos Sudarso No. 21 A - B Batu Itam, Tanjung Pinang
37	Balai Industri Kreatif Digital Dan Kemasan Prov. Jawa Tengah	Jl. Kimangunsarkoro No. 10, Semarang, Jawa Tengah.
38	UPT IPOK Prov. Kalimantan Barat	Jl. Sutan Syahrir No. 2, Pontianak, Kalimantan Barat
39	UPT. Rumah Kemasan Prov. Kalimantan Tengah	Jl. Temanggung Tilung XVI (Lokasi Expo Kalimantan Tengah), Kalimantan Tengah
40	UPTD Layanan Desain Denpasar	Jl. Melati No.31, Denpasar,Bali
41	Rumah Kemasan Bengkulu Utara	Kemumu, Arma Jaya, Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu
42	UPTD Balai Industri Dan Kemasan Prov. Lampung	Jl. Cut Meutia No. 36, Kel. gulak galik, kec. teluk betung utara, Kota Bandar Lampung
43	UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan Prov. Jawa Timur	Jl. Raya Trosobo Km. 20, Taman Sidoarjo, Jawa Timur
44	Rumah Kemasan Indag Jabar	Jl. Parabon III No. 1, RT 05/RW 14, Kel. Sekejati, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat
45	Rumah Kemasan Kota Tarakan	Jl. Patimura No.17 Kel.Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
46	Unit Layanan Kemasan Plut Kab. Dairi	Gedung UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu Jl. Olahraga Kel. Sidikalang Kec. Sidikalang

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2025

2. Program Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kementerian Koperasi dan UKM

Mengingat besarnya jumlah UMKM yang ada di Indonesia dan masih terbatasnya akses UMKM untuk mendapatkan layanan kemasan di daerah, maka sebagai bentuk implementasi kebijakan untuk mendukung pengembangan kemasan produk UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM C.q Deputi Bidang Usaha Mikro pada tahun 2023 mengikuti jejak Kementerian Perindustrian dengan meluncurkan Program Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK).

Pelaksanaan program pengembangan kemasan produk UMK didasarkan pada regulasi yang satu tahun sebelumnya telah diterbitkan, yaitu berupa Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kemasan Produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan, dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2022 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Dalam peraturan tersebut, pengembangan kemasan produk hanya diperuntukkan kepada pelaku UMK, tidak untuk Usaha Menengah, dengan pertimbangan bahwa Usaha Menengah dinilai sudah memiliki kemampuan mandiri (*bankable dan self-sustaining*) untuk mendanai riset pasar, membeli mesin kemasan modern, atau menyewa desainer profesional secara komersial. Sementara UMK masih terjebak pada masalah pemenuhan kebutuhan pokok operasional (*survival mode*), sehingga intervensi anggaran negara (seperti Dana Tugas Pembantuan) diprioritaskan kepada pelaku UMK.

Permenkop dan UKM Nomor 14 tahun 2022 mengatur pelaksanaan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil melalui dana tugas pembantuan. Regulasi ini menjadi landasan hukum sekaligus pedoman operasional agar alokasi dana Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dioptimalkan secara spesifik untuk meningkatkan kualitas, standar, dan daya saing kemasan produk milik UMK yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing dan nilai tambah produk UMK.

Pengembangan kemasan yang dibiayai atau difasilitasi lewat instrumen Dana Tugas Pembantuan umumnya mencakup beberapa aspek intervensi, di antaranya:

1. Fasilitasi Desain dan Cetak Kemasan: Membantu UMK mendapatkan identitas visual (logo, warna, tata letak) yang menarik dan sesuai dengan karakteristik produk.
2. Penyediaan Sarana/Prasarana: Penguatan kapasitas atau pembangunan institusi layanan kemasan di daerah, seperti Rumah Kemasan atau Pusat

Pelayanan Kemasan (PPK), yang berfungsi sebagai tempat konsultasi, desain, hingga produksi kemasan skala lokal.

3. Edukasi dan Bimbingan Teknis: Pelatihan bagi pelaku UMK mengenai pentingnya material kemasan yang tepat, teknik pelabelan serta cara menghitung efisiensi biaya kemasan terhadap harga pokok penjualan.

Salah satu kegiatan utama program pengembangan kemasan produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan adalah memfasilitasi pembentukan Layanan Kemasan Produk UMK di daerah. Pelaksanaan program dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dari tahap sosialisasi hingga pelaksanaan.

Gambar 1.2 Skema Pelaksanaan Program Pengembangan Kemasan UMK



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2024

1. Tahap Sosialisasi & Diseminasi (Dasar Kebijakan)

- a) Sosialisasi Permenkop UKM No. 14 Tahun 2022: Kementerian Koperasi dan UKM melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai pedoman umum dan teknis penyaluran Dana Tugas Pembantuan.
- b) Penyampaian Informasi Peluang: Pemerintah Daerah menerima informasi mengenai ketersediaan anggaran dan syarat-syarat teknis untuk pembentukan Layanan Kemasan.

2. Tahap Pengusulan (*Bottom-Up*)

- a) Penyusunan Proposal: Dinas Koperasi & UKM menyusun proposal teknis yang mencakup ketersediaan lahan/gedung, data potensi UMK,

dan rencana keberlanjutan, kemudian disampaikan kepada kepala daerah

- b) Pengiriman Permohonan dan Proposal: Surat Permohonan dan Proposal yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dikirimkan secara resmi kepada Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
3. Tahap Verifikasi & Penetapan
- a) Telaah Teknis: Deputi Bidang Usaha Mikro melakukan verifikasi lapangan atau administratif terhadap kelayakan Proposal.
 - b) Penetapan Lokasi: Penerbitan Keputusan Menteri tentang penetapan daerah penerima Tugas Pembantuan.
4. Tahap Administratif & Pecah DIPA
- a) Proses Pecah DIPA: Pengalokasian dana dari DIPA Bagian Anggaran Kementerian (097) ke DIPA Tugas Pembantuan yang akan dikelola oleh Satker di daerah.
 - b) Penunjukan Pejabat Perbendaharaan: Gubernur/Bupati atau Kepala Dinas terkait menunjuk KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran untuk mengelola dana tersebut.
5. Tahap Pelaksanaan (Pembangunan & Operasional)
- a) Pengadaan Sarana: Proses lelang/pengadaan mesin-mesin pengemas dan peralatan pendukung Layanan Kemasan.
 - b) Pemberian Layanan: Implementasi nyata di mana UMK mulai mendapatkan fasilitasi desain dan cetak kemasan.
 - c) Pelaporan: Satker daerah menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan kepada Deputi Bidang Usaha Mikro secara berkala.

Melalui skema Tugas Pembantuan pada awalnya anggaran berada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan UKM kemudian dilakukan proses Pecah DIPA menjadi DIPA Pemerintah Daerah. Setelah menjadi DIPA daerah, seluruh perangkat pelaksana anggaran seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selain mengatur skema Tugas Pembantuan, dalam Permenkop UKM Nomor 14/2022 tersebut juga diatur tanggung jawab dari pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah calon penerima program diharuskan untuk menyediakan gedung/lokasi sebagai tempat layanan pengembangan kemasan, menetapkan UPTD PLUT KUMKM atau Koperasi sebagai pengelola Layanan Pengembangan Kemasan dan menyediakan APBD untuk mendukung operasional Layanan Pengembangan Kemasan di tahun kedua.

Dana Tugas Pembantuan ke daerah dialokasikan untuk mendukung kegiatan yang meliputi : Pengadaan Peralatan Produksi Kemasan, Pengadaan Peralatan Desain Kemasan, Pengadaan Meja/Kursi dan Rak Ruang Layanan Kemasan, Pengadaan Sarana Ruang Layanan Kemasan, Pengadaan Bahan Baku Produksi Kemasan, Pembayaran Honor Pengelola Layanan Kemasan dan Dukungan Operasional Pengelola Satuan Kerja (Satker) Tugas Pembantuan. Dukungan dana Tugas Pembantuan hanya berlaku hingga akhir tahun pelaksanaan anggaran. Untuk tahun selanjutnya, operasional Layanan Kemasan, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah penerima program.

Pada tahun 2023, Program pengembangan kemasan produk UMK disosialisasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM C.q Deputi Bidang Usaha Mikro kepada seluruh Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil seleksi atas permohonan dan proposal dari daerah, Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2023, menetapkan 13 daerah sebagai penerima program pengembangan kemasan, melalui Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 100 Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Penerima Program Pengembangan Kemasan Produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023. Dana tersebut untuk memfasilitasi pembentukan Layanan Kemasan di 13 daerah/lokasi yaitu :

Tabel 1.3 Pemerintah Daerah Penerima Program Tahun 2023

No	Daerah Penerima Program	Pengelola Layanan Kemasan
1	Provinsi Riau	PLUT KUMKM
2	Provinsi Sumatera Utara	PLUT KUMKM
3	Provinsi Maluku	PLUT KUMKM
4	Kabupaten Pelalawan	PLUT KUMKM
5	Kabupaten Cianjur	PLUT KUMKM
6	Kabupaten Gianyar	PLUT KUMKM
7	Kabupaten Subang	PLUT KUMKM
8	Kabupaten Kuningan	PLUT KUMKM
9	Kota Surakarta	PLUT KUMKM
10	Kota Bandar Lampung	Koperasi
11	Kabupaten Tegal	Koperasi
12	Kabupaten Garut	Koperasi
13	Kota Medan	Koperasi

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2023

Pada tahun 2024 Kementerian Koperasi dan UKM kembali melanjutkan Program Pengembangan Kemasan Produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan. Program ini tetap menjadi program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM. Dari proses seleksi atas semua permohonan dan proposal yang masuk dari daerah, ditetapkan 10 daerah sebagai penerima program, melalui Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 185 Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Penerima Program Pengembangan Kemasan Produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024. Dana tersebut untuk memfasilitasi pembentukan Layanan Kemasan di 10 daerah/lokasi yaitu :

Tabel 1.4 Pemerintah Daerah Penerima Program Tahun 2024 Tahap I

No	Daerah Penerima Program	Pengelola Layanan Kemasan
1	Provinsi Sumatera Barat	PLUT KUMKM
2	Kabupaten Jembrana	PLUT KUMKM
3	Kabupaten Belitung	PLUT KUMKM
4	Kota Batam	PLUT KUMKM
5	Kabupaten Bandung	PLUT KUMKM
6	Kabupaten Dairi	PLUT KUMKM
7	Kabupaten Sikka	Koperasi
8	Kabupaten Banyuwangi	Koperasi
9	Kabupaten Sumedang	Koperasi
10	Kabupaten Temanggung	Koperasi

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2024

Selain 10 lokasi tersebut, Deputy Bidang Usaha Mikro, sebagai penanggung jawab program, mengusulkan penambahan anggaran Program Pengembangan Kemasan Produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan untuk dialokasikan kepada 8 daerah/lokasi lainnya. Usulan tambahan anggaran tersebut disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Dengan adanya penambahan anggaran maka ditetapkan kembali 8 daerah lain yang telah diseleksi berdasarkan permohonan dan proposal yang ada sebagai penerima program melalui Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 233 Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Penerima Program Pengembangan Kemasan Produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 Tahap II. Dana tersebut untuk memfasilitasi pembentukan Layanan Kemasan di 8 daerah/lokasi yaitu :

Tabel 1.5 Pemerintah Daerah Penerima Program Tahun 2024 Tahap II

No	Daerah Penerima Program	Pengelola Layanan Kemasan
1	Kabupaten Tabalong	PLUT KUMKM
2	Kabupaten Buleleng	PLUT KUMKM
3	Kabupaten Bengkulu Utara	PLUT KUMKM
4	Kota Kendari	PLUT KUMKM
5	Provinsi Kalimantan Selatan	Koperasi
6	Kabupaten Kediri	Koperasi
7	Kabupaten Klaten	Koperasi
8	Kabupaten Lebak	Koperasi

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2024

Hingga akhir tahun 2024 seluruh proses administrasi pengadaan program Pengembangan Kemasan Produk UMK telah selesai dilaksanakan, peralatan/mesin kemasan telah dikirim oleh penyedia ke daerah masing-masing. Tenaga SDM Layanan Kemasan juga telah direkrut dan dilatih oleh Tim Kementerian Koperasi dan UKM, didukung oleh Tenaga Ahli Kemasan UMKM. Dengan dukungan peralatan/mesin kemasan dan SDM Layanan Kemasan, sebagian besar Layanan Kemasan yang dibentuk mulai beroperasi dan memberikan pelayanan kepada pelaku UMK baik berupa layanan konsultasi, pembuatan desain dan pencetakan kemasan. (Kemenkop dan UKM, 2024)

Program Pengembangan Kemasan Produk UMK yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023 dan 2024 kemudian pada tahun 2025 dilimpahkan kepada Kementerian UMKM melalui Deputy Bidang Usaha Mikro C.q Asdep Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program di daerah, terutama bagi daerah penerima program 2024, Kementerian UMKM pada bulan Maret hingga April 2025 melakukan survei *monitoring* pelaksanaan program pengembangan kemasan produk UMK untuk 18 daerah penerima program tahun 2024, dengan rekapitulasi hasilnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.6 Survei *Monitoring* Layanan Kemasan

No	Lokasi	Pengelola	Operasional	APBD Honorarium SDM	APBD Belanja Bahan Baku
1	Kab. Bandung	PLUT KUMKM	Sudah	Tersedia	Tersedia
2	Kab. Banyuwangi	Koperasi	Sudah	Tersedia	Tersedia
3	Kab. Belitung	PLUT KUMKM	Sudah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
4	Kab. Bengkulu Utara	Dinas KUMKM	Sudah	Tersedia	Tidak Tersedia
5	Kab. Buleleng	PLUT KUMKM	Sudah	Tersedia	Tidak Tersedia
6	Kab. Dairi	PLUT KUMKM	Sudah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
7	Kab. Jemberana	PLUT KUMKM	Sudah	Tersedia	Tidak Tersedia
8	Kab. Kediri	Dinas KUMKM	Belum	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
9	Kab. Klaten	Koperasi	Belum	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
10	Kab. Lebak	Dinas KUMKM	Sudah	Tersedia	Tidak Tersedia
11	Kab. Sumedang	Koperasi	Sudah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
12	Kab. Tabalong	PLUT KUMKM	Belum	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
13	Kab. Temanggung	Dinas KUMKM	Sudah	Tersedia	Tidak Tersedia
14	Kota Batam	PLUT KUMKM	Sudah	Tersedia	Tidak Tersedia
15	Kota Kendari	PLUT KUMKM	Belum	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
16	Prov. Kalimantan Selatan	Dinas KUMKM	Belum	Tersedia	Tersedia
17	Prov. Sumatera Barat	PLUT KUMKM	Sudah	Tersedia	Tidak Tersedia

Sumber : Kementerian UMKM, 2025

Berdasarkan hasil *monitoring* daerah penerima program tahun 2024, diperoleh gambaran bahwa keberlanjutan layanan kemasan di daerah masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Dari 18 daerah penerima program tahun 2024, terdapat 17 daerah yang memberikan respons melalui survei *monitoring* dan evaluasi, sedangkan Kabupaten Sikka tidak mengisi survei.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sebanyak 12 dari 17 daerah responden atau 70,59% telah mulai beroperasi memberikan layanan kepada pelaku UMK, sedangkan 5 daerah atau 29,41% belum mulai beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program telah difasilitasi melalui penyediaan peralatan, mesin, dan dukungan awal dari pemerintah pusat, tidak seluruh daerah mampu segera mengoperasionalkan layanan kemasan secara efektif.

Dari aspek kelembagaan dan tata kelola, sebagian besar daerah telah memiliki dasar operasional awal. Sebanyak 14 daerah atau 82,35% menyatakan telah memiliki proses bisnis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan kemasan. Namun demikian, keberadaan SOP belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan layanan apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia, anggaran operasional, bahan baku, serta mekanisme pengelolaan yang memadai. Data *monitoring* menunjukkan bahwa hanya 10 daerah atau 58,82% yang memiliki dukungan APBD Tahun 2025 untuk honorarium SDM layanan kemasan, sementara 7 daerah atau 41,18% tidak memiliki dukungan tersebut. Dari sisi SDM, manajer layanan kemasan tersedia di 11 daerah atau 64,71%, desainer tersedia di 15 daerah atau 88,24%, dan operator mesin tersedia di 13 daerah atau 76,47%. Artinya, masih terdapat daerah yang belum memiliki komposisi SDM lengkap untuk mengelola layanan secara optimal.

Permasalahan yang lebih menonjol terdapat pada dukungan anggaran operasional nonhonorarium. Hasil *monitoring* menunjukkan bahwa hanya 2 daerah atau 11,76% yang memiliki APBD tahun 2025 untuk belanja bahan baku, sedangkan 15 daerah atau 88,24% tidak memiliki dukungan APBD untuk belanja bahan baku. Seluruh daerah responden atau 100% juga menyatakan tidak memiliki dukungan APBD tahun 2025 untuk pemeliharaan mesin. Selain itu, hanya 5 daerah atau 29,41% yang memiliki dukungan APBD untuk pemeliharaan gedung, sementara 12 daerah atau 70,59% tidak memiliki dukungan anggaran tersebut. Temuan ini memperlihatkan adanya persoalan keberlanjutan program setelah dukungan awal dari pemerintah pusat berakhir. Layanan kemasan yang telah dibentuk berisiko tidak dapat beroperasi secara

optimal apabila daerah tidak memiliki kemampuan fiskal dan skema kelembagaan yang mampu membiayai bahan baku, pemeliharaan mesin, dan kebutuhan operasional lainnya.

Dalam konteks Kabupaten Lebak, hasil *monitoring* menunjukkan bahwa Layanan Kemasan Kabupaten Lebak telah memiliki sejumlah prasyarat awal yang relatif baik. Layanan yang tersedia meliputi layanan desain grafis/digital, desain kemasan, pengemasan, dan foto produk. SOP layanan telah tersedia, proses hibah sudah dilakukan, SDM pengelola yang terdiri atas manajer, desainer, dan operator mesin juga tersedia, serta layanan telah mulai beroperasi untuk melayani pelaku UMK. Dari sisi sarana, beberapa mesin dan peralatan utama seperti mesin kemasan A3 printer, mesin cetak karton/kertas *single pass*, mesin laminasi, *continuous band sealer*, *continuous sealer gas*, *automatic vacuum sealer*, mesin *cutting sticker*, mesin potong kertas otomatis, PC/laptop desainer, *tablet* desainer, dan kamera berada dalam kondisi terawat.

Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten yang memiliki potensi ekonomi lokal cukup besar. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari sektor pertanian, tetapi juga dari sektor perkebunan, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, pariwisata, dan UMKM. Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah, sekaligus menjadi basis bagi pengembangan industri berbasis komoditas lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki peluang untuk mengembangkan produk-produk olahan yang bersumber dari potensi lokal masyarakat.

Potensi ekonomi tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan keberadaan pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Lebak. Data usaha mikro Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro di daerah ini mencapai 72.485 unit yang tersebar dalam berbagai jenis usaha. Dari jumlah tersebut, kategori warungan dan kuliner tercatat sebanyak 10.112 unit, *fashion* sebanyak 904 unit, kriya sebanyak 740 unit, jasa sebanyak 4 unit, digital

sebanyak 23 unit, dan kategori lainnya sebanyak 60.702 unit (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, 2025). Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki basis pelaku usaha mikro yang cukup besar dan beragam, sehingga membutuhkan dukungan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah usaha, tetapi juga peningkatan kualitas dan daya saing produk.

Keberadaan potensi UMK yang besar tersebut menghadirkan tantangan tersendiri. Produk UMK, terutama produk makanan, minuman, kerajinan, dan produk olahan lokal, tidak cukup hanya mengandalkan kualitas isi produk. Dalam persaingan pasar yang semakin terbuka, kemasan menjadi unsur penting yang menentukan persepsi konsumen terhadap kualitas, keamanan, dan profesionalitas produk. Kemasan yang baik membantu produk UMK memiliki identitas yang lebih jelas, informasi produk yang lebih lengkap, tampilan yang lebih menarik, serta peluang lebih besar untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Sebaliknya, produk yang memiliki kualitas isi yang baik dapat mengalami kesulitan bersaing apabila tidak didukung oleh kemasan yang layak, informatif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dalam konteks Kabupaten Lebak, kebutuhan terhadap layanan kemasan menjadi relevan karena banyak pelaku UMK masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses desain kemasan, bahan baku kemasan, teknologi pencetakan, dan layanan produksi kemasan dalam skala yang sesuai dengan kemampuan usaha mikro. Banyak pelaku UMK belum mampu memenuhi kebutuhan minimum order dari penyedia kemasan komersial, belum memiliki kemampuan desain visual, serta belum memahami sepenuhnya pentingnya informasi label dan tampilan produk. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan layanan kemasan tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemberdayaan UMK dan peningkatan daya saing ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Lebak, melalui Pj. Bupati Lebak, Gunawan Rusminto, pada awal Desember 2024 telah meresmikan SINTESA UMKM yang sekaligus meresmikan beroperasinya Rumah Kemasan SINTESA Lebak di

kawasan Plaza Lebak/Rangkasbitung. SINTESA UMKM dirancang sebagai Sinergi Integrasi Pembinaan Ekosistem Daya Saing UMKM yang menggabungkan beberapa layanan pembinaan UMKM dalam satu ekosistem. Dalam bentuk fisiknya, SINTESA UMKM memadukan inkubasi bisnis, rumah kemasan, dan *co-working space* sebagai ruang bersama bagi pelaku UMKM untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan, memperoleh layanan pengembangan usaha, serta meningkatkan daya saing produk.

Keberadaan dan peresmian SINTESA UMKM menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak telah memiliki komitmen awal dalam membangun ekosistem pembinaan UMKM yang lebih terintegrasi. SINTESA UMKM dirancang sebagai wadah yang menyatukan inkubasi bisnis, rumah kemasan, *co-working space*, dan ruang interaksi pelaku UMKM dalam satu ekosistem pembinaan. Konsep ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di Kabupaten Lebak tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan secara terpisah, tetapi mulai diarahkan pada layanan yang lebih terpadu, mulai dari penguatan kapasitas usaha, peningkatan kualitas kemasan, pengembangan desain, sampai perluasan jejaring usaha.

Keberadaan Rumah Kemasan SINTESA menjadi penting karena layanan tersebut berhubungan langsung dengan kebutuhan pelaku UMK dalam meningkatkan nilai tambah produk. Rumah kemasan tidak hanya berfungsi sebagai tempat mencetak atau membuat kemasan, tetapi juga sebagai fasilitas layanan yang membantu pelaku UMK memperoleh konsultasi, desain, pengemasan, foto produk, dan pendampingan teknis. Dengan adanya rumah kemasan, pelaku UMK diharapkan memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan kemasan yang sebelumnya sulit dijangkau secara mandiri. Artinya, Rumah Kemasan SINTESA menjadi salah satu instrumen kebijakan daerah untuk memperkuat daya saing produk UMK berbasis potensi lokal Kabupaten Lebak.

Namun demikian, keberadaan fasilitas layanan tidak secara otomatis menjamin kebijakan berjalan optimal. Rumah Kemasan SINTESA memang

telah memiliki dasar operasional awal, seperti sarana prasarana, mesin, SDM pengelola, dan SOP layanan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat persoalan yang dapat memengaruhi keberlanjutan layanan, antara lain ketersediaan bahan baku, tinta atau toner, pemeliharaan mesin, dukungan anggaran operasional, pemanfaatan mesin, serta model pengelolaan layanan. Persoalan ini penting dikaji karena rumah kemasan memiliki karakter layanan publik sekaligus karakter produksi yang membutuhkan fleksibilitas operasional, ketersediaan stok, pembiayaan rutin, dan pengelolaan teknis yang berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan daerah lain penerima program pengembangan kemasan, Kabupaten Lebak memiliki posisi yang menarik untuk diteliti karena berada pada situasi antara kesiapan awal dan tantangan keberlanjutan. Di satu sisi, Rumah Kemasan SINTESA telah diresmikan dan mulai dioperasikan sebagai bagian dari ekosistem pembinaan UMKM daerah. Di sisi lain, keberlanjutan layanan masih menghadapi hambatan sumber daya dan tata kelola yang dapat mengurangi efektivitas program. Dengan demikian, Kabupaten Lebak tidak dipilih semata-mata karena menjadi penerima program, tetapi karena memperlihatkan adanya jarak antara desain kebijakan, kesiapan fasilitas, dan realitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kabupaten Lebak menjadi lokasi yang relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan kemasan produk UMK. Potensi UMK yang besar, keberadaan produk lokal, telah beroperasinya Rumah Kemasan SINTESA, serta masih adanya persoalan operasional dan kelembagaan menjadikan Kabupaten Lebak sebagai kasus yang penting untuk dikaji. Melalui penelitian ini, implementasi kebijakan pengembangan kemasan produk UMK di Kabupaten Lebak dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan. Analisis tersebut diharapkan dapat menjelaskan mengapa implementasi Rumah Kemasan SINTESA belum berjalan optimal dan strategi apa yang diperlukan agar layanan kemasan dapat lebih efektif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi pelaku UMK di Kabupaten Lebak.

B. Identifikasi Masalah

1. Daya saing produk UMK masih menghadapi hambatan, salah satunya disebabkan oleh kualitas kemasan produk yang belum memenuhi kebutuhan pasar, baik dari aspek desain, informasi produk, daya tarik *visual*, maupun kesesuaian material kemasan.
2. Program Pengembangan Kemasan Produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan telah memfasilitasi terbentuknya layanan kemasan di Kabupaten Lebak, tetapi keberlanjutan layanan setelah berakhirnya dukungan anggaran pusat masih menghadapi kendala.
3. Komunikasi kebijakan dan sosialisasi layanan kepada pelaku UMK belum sepenuhnya merata, terutama bagi pelaku UMK yang berada di wilayah kecamatan yang jauh dari pusat layanan.
4. Sumber daya pendukung implementasi kebijakan belum memadai, terutama terkait ketersediaan bahan baku, tinta, anggaran operasional, dukungan APBD, serta kapasitas layanan untuk menjangkau pelaku UMK secara lebih luas.
5. Kelembagaan pengelola layanan kemasan belum sepenuhnya fleksibel karena masih terdapat keterbatasan regulasi mengenai pilihan pengelola, mekanisme tarif, pengelolaan pendapatan, dan model keberlanjutan layanan.
6. SOP layanan telah mulai disusun dan digunakan, tetapi koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola layanan, dan calon mitra pengelola masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan lebih efektif dan berkelanjutan..

C. Rumusan Masalah

Fokus pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan pengembangan kemasan produk UMK di Kabupaten Lebak melalui Pusat Layanan Kemasan Rumah Kemasan SINTESA. Fokus analisis diarahkan pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai variabel implementasi kebijakan menurut Edward III, serta kebutuhan kerja

sama lintas aktor sebagai strategi perbaikan implementasi. Penelitian tidak membahas seluruh program pengembangan UMKM di Kabupaten Lebak, tetapi hanya aspek pengembangan kemasan produk UMK dan keberlanjutan pengelolaan layanan kemasan pasca-dukungan Dana Tugas Pembantuan.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa implementasi kebijakan pengembangan kemasan produk UMK di Kabupaten Lebak melalui Rumah Kemasan SINTESA belum berjalan dengan optimal?
2. Bagaimana strategi implementasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Rumah Kemasan SINTESA Lebak?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan pengembangan kemasan produk UMK di Kabupaten Lebak melalui Rumah Kemasan SINTESA.
2. Merumuskan strategi implementasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan layanan kemasan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pelaksanaan program pengembangan kemasan produk Usaha Mikro dan Kecil di daerah. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan implementasi kebijakan pada layanan publik yang memiliki karakter semi-bisnis.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kajian administrasi publik, manajemen kebijakan publik, dan pengembangan UMK, terutama yang

berkaitan dengan pengelolaan rumah kemasan sebagai instrumen peningkatan daya saing produk lokal. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji implementasi program rumah kemasan atau layanan pendukung UMK di daerah lain.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lebak dalam memperbaiki pengelolaan Rumah Kemasan SINTESA, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, anggaran, SDM, maupun kerja sama. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi Kementerian UMKM dalam merancang kebijakan pasca-hibah yang lebih berkelanjutan, termasuk penyediaan pilihan model pengelolaan yang melibatkan koperasi, BUMD, dan mitra lain yang berpengalaman. Bagi pelaku UMK, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada tersedianya layanan kemasan yang lebih mudah diakses, terjangkau, profesional, dan berkelanjutan.

3. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan Rumah Kemasan SINTESA Lebak sebagai objek implementasi kebijakan pengembangan kemasan produk Usaha Mikro dan Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan. Penelitian terdahulu umumnya membahas kemasan dari sisi manfaat desain, pelatihan, *branding*, inovasi produk, atau evaluasi layanan rumah kemasan. Sebagian penelitian memang telah membahas rumah kemasan, tetapi belum banyak yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan rumah kemasan daerah dengan menggunakan empat dimensi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini berbeda karena tidak hanya melihat rumah kemasan sebagai fasilitas teknis untuk mendesain atau mencetak kemasan. Penelitian ini menempatkan rumah kemasan sebagai instrumen kebijakan publik yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan cara pandang

tersebut, penelitian ini mampu menjelaskan bahwa belum optimalnya Rumah Kemasan SINTESA Lebak bukan hanya disebabkan oleh persoalan teknis seperti bahan baku, tinta, atau mesin, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola, model kelembagaan, pembiayaan operasional, dan fleksibilitas birokrasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV mengenai implementasi kebijakan pengembangan kemasan produk Usaha Mikro dan Kecil melalui Rumah Kemasan SINTESA Lebak, kesimpulan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu faktor-faktor penyebab belum optimalnya kinerja Rumah Kemasan SINTESA dan strategi implementasi yang diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan layanan.

Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kinerja Rumah Kemasan SINTESA: *Pertama*, implementasi kebijakan pengembangan kemasan produk UMK melalui Rumah Kemasan SINTESA Lebak telah berjalan, tetapi belum optimal dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Hasil observasi menunjukkan bahwa Rumah Kemasan SINTESA telah memiliki modal dasar berupa gedung, ruang layanan, ruang konsultasi, ruang produksi, mesin, peralatan desain, bahan baku awal, SOP layanan, serta sumber daya manusia teknis. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaksana memahami tujuan program dan memiliki komitmen untuk membantu pelaku UMK memperbaiki desain, label, serta tampilan kemasan produk.

Namun, hasil Bab IV menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas dan komitmen pelaksana belum cukup menjamin keberlanjutan layanan. Berdasarkan rekap produksi kemasan UMK tahun 2026, total layanan/produksi yang tercatat mencapai 4.708 unit, tetapi produksinya terkonsentrasi pada Januari sebanyak 2.365 unit atau 50,23%, Februari sebanyak 2.040 unit atau 43,33%, dan Maret sebanyak 303 unit atau 6,44%, sedangkan April sampai dengan Juni belum menunjukkan volume produksi pada dokumen rekap yang digunakan dalam penelitian. Pola ini menunjukkan bahwa layanan telah beroperasi, tetapi konsistensi produksi masih rentan karena dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku, tinta atau toner, pembiayaan operasional, dan tata kelola produksi.

Dilihat dari jenis layanan, produksi terbesar berasal dari jasa sablon plastik sebanyak 2.400 unit atau 50,98%, diikuti standing pouch ziplock sebanyak 985 unit atau 20,92%, standing pouch ziplock ukuran 13x22 sebanyak 660 unit atau 14,02%, standing pouch sebanyak 460 unit atau 9,77%, paper bag sebanyak 115 unit atau 2,44%, standing pouch ziplock ukuran 16x24 sebanyak 50 unit atau 1,06%, dan stiker A3 sebanyak 38 unit atau 0,81%. Data tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan pelaku UMK terhadap layanan kemasan cukup nyata, terutama pada kemasan praktis untuk produk makanan, minuman, dan produk konsumsi lokal. Akan tetapi, dominasi beberapa jenis layanan juga menunjukkan bahwa diversifikasi layanan, kesiapan bahan, dan kapasitas produksi masih perlu diperkuat.

Kedua, faktor penyebab belum optimalnya kinerja Rumah Kemasan SINTESA dapat dijelaskan melalui empat dimensi implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada dimensi komunikasi, komunikasi internal layanan sudah berjalan melalui konsultasi, penjelasan kebutuhan desain, dan interaksi langsung antara petugas dengan pelaku UMK. Akan tetapi, sosialisasi eksternal belum merata, sehingga belum semua pelaku UMK mengetahui jenis layanan, prosedur, manfaat, kapasitas produksi, dan mekanisme pemanfaatan Rumah Kemasan SINTESA.

Pada dimensi sumber daya, kendala utama terletak pada keterbatasan bahan baku, tinta atau toner, pemeliharaan mesin, pembiayaan operasional, dan peningkatan kapasitas SDM teknis. Rumah Kemasan SINTESA telah memiliki mesin dan tenaga teknis, tetapi layanan kemasan tidak dapat berjalan hanya dengan aset awal. Layanan ini membutuhkan input operasional harian berupa bahan habis pakai, sistem stok, pemasok bahan, biaya perawatan mesin, jadwal produksi, dan operator yang terus diperkuat kompetensinya. Oleh karena itu, sumber daya menjadi faktor operasional yang langsung memengaruhi konsistensi layanan kepada UMK.

Pada dimensi disposisi, pelaksana menunjukkan sikap mendukung, responsif, dan berorientasi membantu penerima layanan. Hal ini diperkuat oleh

hasil kuesioner kepada 15 responden UMK penerima layanan, yaitu 15 responden atau 100% menyatakan petugas menjelaskan persyaratan dan proses dengan jelas, informasi antarpelaksana konsisten, kualitas cetak bagus dan tahan lama, serta sikap petugas baik dan membantu. Selain itu, 14 responden atau 93,33% menyatakan desain atau kemasan baru berdampak terhadap penjualan atau omzet. Temuan ini menunjukkan bahwa layanan Rumah Kemasan SINTESA dinilai bermanfaat oleh penerima layanan. Namun, disposisi positif tersebut belum cukup apabila tidak didukung pembagian tugas, insentif, target layanan, sistem evaluasi, dan kelembagaan yang kuat.

Pada dimensi struktur birokrasi, persoalan paling strategis terletak pada belum fleksibelnya model kelembagaan pengelola. SOP teknis layanan telah tersedia, tetapi mekanisme pengelolaan aset, tarif layanan, penggunaan pendapatan, pembelian bahan baku, pemeliharaan mesin, kerja sama teknis, dan model bisnis operasional belum sepenuhnya sesuai dengan karakter rumah kemasan sebagai layanan publik yang sekaligus memiliki aktivitas produksi semi-bisnis. Struktur birokrasi yang belum adaptif membuat Rumah Kemasan SINTESA sulit bergerak cepat dalam memenuhi kebutuhan operasional dan permintaan pelaku UMK.

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya dan struktur birokrasi merupakan dua dimensi yang paling dominan dalam menjelaskan belum optimalnya kinerja Rumah Kemasan SINTESA Lebak. Komunikasi dan disposisi relatif mendukung, terutama pada level pelayanan langsung, tetapi keberlanjutan layanan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan daerah membangun skema pembiayaan, sistem stok bahan, pemeliharaan mesin, pengelolaan pendapatan, serta model kelembagaan yang legal dan fleksibel. Dengan demikian, akar masalah implementasi bukan terletak pada ketiadaan fasilitas, melainkan pada belum kuatnya sistem operasional dan kelembagaan pasca-dukungan awal program.

Sedangkan strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengoptimalkan kinerja Rumah Kemasan Sintesa adalah : *Pertama*, strategi penguatan Rumah

Kemasan SINTESA Lebak perlu diarahkan pada pembangunan sistem layanan yang berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi penguatan kelembagaan pengelola, penyusunan SOP operasional yang lebih rinci, kepastian pembiayaan operasional, pengelolaan stok bahan baku dan bahan habis pakai, pemeliharaan mesin, peningkatan kapasitas SDM teknis, pengembangan administrasi order dan database UMK, perluasan sosialisasi layanan, *monitoring* dan evaluasi berbasis kinerja, serta kerja sama dengan mitra teknis atau rumah kemasan yang telah berpengalaman.

Kedua, strategi penguatan tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal diarahkan pada pembenahan internal berupa pencatatan order, pengelolaan stok, pembagian tugas, quality control, katalog layanan, dan penataan ruang produksi. Tahap berikutnya diarahkan pada penetapan model kelembagaan, skema tarif, penggunaan pendapatan layanan, dan pembiayaan operasional. Tahap lanjutan diarahkan pada kemitraan teknis, perluasan layanan, edukasi kemasan, dan penguatan jejaring pasar. Dengan strategi tersebut, Rumah Kemasan SINTESA Lebak dapat berkembang dari fasilitas bantuan pemerintah menjadi pusat layanan kemasan daerah yang adaptif, akuntabel, produktif, dan mampu mendukung peningkatan daya saing produk UMK Kabupaten Lebak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran penelitian ini diarahkan kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan keberlanjutan Rumah Kemasan SINTESA Lebak.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lebak

Pemerintah Kabupaten Lebak perlu segera menetapkan arah kelembagaan Rumah Kemasan SINTESA secara lebih jelas, legal, dan operasional. Pilihan model kelembagaan dapat dikaji melalui beberapa alternatif, seperti penguatan unit layanan teknis, pola Badan Layanan Umum Daerah, kerja sama dengan BUMD, koperasi sehat, operator lokal, atau mitra teknis swasta yang memiliki kapasitas pengelolaan rumah kemasan. Model yang

dipilih harus mampu menjaga akuntabilitas aset daerah, tetapi tetap memberikan fleksibilitas dalam pengadaan bahan baku, pemeliharaan mesin, penetapan tarif, penggunaan pendapatan layanan, dan kerja sama teknis.

Pemerintah daerah juga perlu menyediakan dukungan pembiayaan operasional pada masa transisi, terutama untuk bahan baku, tinta atau toner, pemeliharaan mesin, pelatihan SDM, promosi layanan, dan penguatan sistem administrasi. Dukungan APBD tetap diperlukan agar layanan tidak berhenti, tetapi dalam jangka menengah perlu dikombinasikan dengan tarif layanan yang wajar, kerja sama pemasok bahan, dukungan CSR, kemitraan teknis, dan skema pemanfaatan pendapatan layanan sesuai ketentuan hukum.

2. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak perlu memperkuat fungsi pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap Rumah Kemasan SINTESA. Dinas perlu memastikan bahwa SOP layanan benar-benar diterapkan, administrasi order berjalan, stok bahan tercatat, mesin memiliki jadwal pemeliharaan, dan setiap layanan terdokumentasi dalam *database* UMK penerima manfaat. Data tersebut penting sebagai dasar evaluasi kinerja, perencanaan bahan baku, penghitungan biaya produksi, dan pengambilan keputusan program.

Dinas juga perlu memperluas komunikasi layanan kepada pelaku UMK melalui kecamatan, desa, koperasi, komunitas UMK, PLUT, pendamping halal, inkubator bisnis, media sosial, pameran, dan forum pelaku usaha. Informasi yang disampaikan perlu mencakup jenis layanan, prosedur pendaftaran, pilihan bahan kemasan, estimasi biaya, estimasi waktu pengerjaan, contoh hasil kemasan, dan kontak pengaduan. Sosialisasi tidak cukup dilakukan sebagai publikasi umum, tetapi perlu menjadi edukasi bahwa kemasan merupakan bagian dari strategi peningkatan daya saing produk UMK.

3. Bagi Pengelola Rumah Kemasan SINTESA

Pengelola Rumah Kemasan SINTESA perlu memperkuat tata kelola operasional harian. Penguatan tersebut mencakup pencatatan order, pencatatan

stok bahan baku dan bahan habis pakai, pengaturan jadwal produksi, dokumentasi desain, kontrol kualitas cetak, pencatatan biaya produksi, penataan ruang kerja, serta pencatatan keluhan dan umpan balik dari pelaku UMK. Pengelola juga perlu menyusun katalog layanan yang memuat jenis layanan, pilihan bahan, ukuran kemasan, estimasi waktu pengerjaan, dan perkiraan biaya agar pelaku UMK memperoleh informasi yang lebih pasti.

Pengelola juga perlu meningkatkan kapasitas teknis manajer layanan, desainer, operator mesin, dan petugas administrasi. Pelatihan perlu diarahkan pada desain kemasan, standar label, pemilihan bahan, pengoperasian mesin, perawatan ringan, *finishing*, *quality control*, foto produk, pelayanan konsultasi, serta manajemen order. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, Rumah Kemasan SINTESA tidak hanya menjadi tempat mencetak kemasan, tetapi juga pusat konsultasi dan pendampingan kemasan bagi UMK.

4. Bagi Calon Mitra Teknis Rumah Kemasan

Calon mitra teknis Rumah Kemasan SINTESA sebaiknya dipilih berdasarkan kapasitas teknis, pengalaman operasional, jejaring bahan baku, kemampuan transfer pengetahuan, model bisnis layanan, dan kesiapan bekerja sama secara legal dengan pemerintah daerah. Mitra teknis tidak perlu diposisikan sebagai pihak yang mengambil alih aset daerah, tetapi sebagai penguat layanan melalui pelatihan, standardisasi, penyusunan SOP, pasokan bahan, pemeliharaan mesin, perhitungan struktur biaya, dan pengembangan model bisnis.

Rumah Besar Kemasan Mojokerto dapat dipertimbangkan sebagai salah satu calon mitra strategis karena memiliki pengalaman, jejaring, dan pengetahuan teknis dalam pengelolaan layanan kemasan. Namun, Pemerintah Kabupaten Lebak tetap perlu membandingkan opsi tersebut dengan rumah kemasan swasta atau mandiri lain yang memiliki kapasitas selevel agar pemilihan mitra dilakukan secara objektif berdasarkan kebutuhan layanan, kelayakan biaya, kesiapan kerja sama, dan manfaat bagi UMK.

5. Bagi Pelaku UMK Kabupaten Lebak

Pelaku UMK Kabupaten Lebak perlu lebih aktif memanfaatkan Rumah Kemasan SINTESA sebagai sarana konsultasi, desain, pencetakan, pengemasan, dan peningkatan kualitas tampilan produk. Pelaku UMK juga perlu menyiapkan informasi produk secara lengkap, seperti merek, komposisi, berat bersih, izin edar, label halal, tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, alamat produsen, dan identitas usaha agar desain kemasan yang dibuat lebih sesuai dengan standar pasar.

Pelaku UMK juga perlu memberikan umpan balik secara rutin mengenai kualitas desain, kualitas cetak, jenis bahan, harga layanan, waktu pengerjaan, serta manfaat kemasan terhadap pemasaran produk. Umpan balik tersebut dapat digunakan pengelola untuk memperbaiki layanan, menyesuaikan jenis bahan, menyusun prioritas produksi, dan meningkatkan kualitas layanan kepada penerima manfaat.

6. Bagi Kementerian UMKM

Kementerian UMKM perlu menyusun pedoman pasca-hibah atau pasca-Dana Tugas Pembantuan yang lebih operasional bagi daerah penerima program. Pedoman tersebut perlu mengatur pilihan model kelembagaan, pembiayaan operasional, pemeliharaan mesin, status SDM, mekanisme tarif, pengelolaan pendapatan layanan, kerja sama teknis, *monitoring* layanan, dan evaluasi dampak terhadap UMK. Dengan pedoman yang lebih jelas, daerah penerima program memiliki acuan untuk menjaga keberlanjutan layanan setelah dukungan awal pemerintah pusat berakhir.

Kementerian UMKM juga perlu meninjau kembali ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan, terutama pada aspek pengelola layanan, tanggung jawab pasca-hibah, skema pembiayaan, dan mekanisme kemitraan. Selain itu, perlu dibangun jejaring nasional antarrumah kemasan agar daerah

dapat saling belajar mengenai bahan baku, pemeliharaan mesin, pelatihan SDM, standardisasi layanan, dan model bisnis rumah kemasan.

7. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian ini dengan mengukur dampak layanan Rumah Kemasan SINTESA terhadap peningkatan omzet, perluasan pasar, perubahan kualitas visual produk, kepuasan konsumen, dan keberlanjutan usaha UMK dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan beberapa model pengelolaan rumah kemasan di berbagai daerah untuk menemukan pola kelembagaan yang paling sesuai bagi layanan kemasan UMK.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo (2020) *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Alfabeta. ISBN 979-8433-50-6
- Asri Laksmi Riani, Nidyah Widyamurti (2018), *Panduan Pendirian Usaha Pembuatan Desain Kemasan*, Badan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Universitas Sebelas
- Brian W. Hogwood dan Levis A. Gunn dalam Solichin Wahab, 1997, *Pengantar Kebijakan Publik*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Vol. 2). Kencana.
- Dunn, William N, 2004 Disunting oleh Muhadjir Darwin, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, PT Hamindita Graha Widia
- Keban, Y. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Gava Media
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Jilid 1 dan 2. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.
- Lembaga Administrasi Negara RI. (2011). *Perumusan Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan* (Mengadaptasi Teori Anderson). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- OECD. (2021). *The Digital Transformation of SMEs*. OECD Publishing, Paris
- Pasolong, Harbani, 2008, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta. Bandung.
- Riyanto, Y., 2003, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit SIC, Surabaya.
- Rulinawaty Kasmad (2013), *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Makassar, Kedai Aksara
- Subianto, Agus. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant, 2020.
- Suparno, 2017, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek, Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*, Dwiputra Pustaka Jaya, Sidoardjo,

Wahab, S. A. (2014). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

JURNAL

Atabara, A., Suprojo, A., & Hardianto, W. T. (2024). Implementasi pelayanan Rumah Kemasan PLUT UMKM Kota Batu. *Jurnal Humaniora*, 2(1), 221-231. doi.org

Arif Faisal Asri, Chemah Tamby Chik, Mohamad Helmi Mohd Rais,, Nursyafikah Othman (2020), SME Product Packaging: How to Attract Consumers?, *International Journal of Business Society*,, 4 (7), 102-109

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQwIzI=/jumlah-perusahaan-industri-skala-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi.html>

BRIN Soroti Pengemasan sebagai Hambatan bagi UMKM, BRIN, <https://www.brin.go.id/news/124827/brin-soroti-pengemasan-sebagai-hambatan-bagi-umkm>, diterbitkan pada 16 September 2025

Dewi, L. K. C., Antari, N. L. S., & Hartini, N. M. (2022). Inovasi packaging untuk produk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Petak Gianyar. *Paradharma (Jurnal Aplikasi IPTEK)*, 6(1). doi.org

Du, J., Liu, Y., Luo, S., & Luo, X. (2024). *A Study on the Trade Efficiency and Potential of China's Agricultural Products Export to Association of South East Asian Nations Countries: Empirical Analysis Based on Segmented Products. Agriculture*, 14(8), 1387. <https://doi.org/10.3390/agriculture14081387>

Erikkson, Tilda, *A Basic Guide to Packaging Development*, <https://www.collabra.se/en/blog/guide-to-packaging-development>, 2024-07-04 02:54

Fadland, D., Herawati, N. and Hardilina, 2013. Implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS UNTAN*

Hanafiah, A., Lubis, S. N., & P., C. M. (2023). *Analysis of the packaging house program in Batu Bara Regency: Enhancing the competitiveness of MSME products for regional economic development in Batu Bara Regency. International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 42(1), 6-11.

- Indrawan, S., Azmi, K., & Wiroto, N. (2024). Implementasi desain kemasan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing produk. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(9), 1305-1309. doi.org
- Krairop Charoensop, Wat Ploysri and Kotchaporn Thangunpai (2021), Improvement of Branding and Packaging For Empowering The Marketing Competitiveness of SMEs In The Udon Thani Province, Thailand, *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 9 July 2021: 3062 – 3072*
- Kukuh Lukiyanto, Bahar Laksamana Darmawan , Fahrizal Maulana, Perception of Environmentally Friendly Packaging in Micro and Small Enterprises for Business Development, *International Conference on Engineering Management and Sustainable Innovative Technology*, Volume 2024
- Megawati, S., Herdiansyah, H., Machmud, A., Antriyandarti, E., & Sudirman, S. (2024). Integrating circular economy, digital economy, and social protection policies to drive green business innovation: Insights from Indonesia's culinary SMEs. *Problems and Perspectives in Management*, 22(4), 368-381. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(4\).2024.28](https://doi.org/10.21511/ppm.22(4).2024.28)
- Misopoulos, F., & Bajiraj, P. (2025). Shared Producer Responsibility for Sustainable Packaging in FMCG: The Convergence of SDGs, ESG Reporting, and Stakeholder Engagement. *Sustainability*, 17(14), 6654. <https://doi.org/10.3390/su17146654>
- Muryani, A., & Prabawati, I. (2025). Implementasi kebijakan pengembangan kemitraan UMKM di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, X(X), Halaman. daarulhuda.or.id
- Oktaria, R., Hildayanti, S. K., Hertati, L., & Hendarmin, R. M. R. (2023). Peningkatan daya saing melalui inovasi kemasan olahan emping singkong di Desa Petanang.
- Pradnyawati, Strategi Perluasan Ekspor melalui Upaya Diversifikasi dan Penguatan Ekosistem Pendukung, *Kompeten (Kanal Informasi dan Media Publikasi Talenta Perdagangan)*, Kementerian Perdagangan, Vol. 4 No 2 Tahun 2025
- Rahayu. (2024). Desain kemasan untuk UKM sebagai strategi meningkatkan daya tarik dan daya saing produk. <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/swagati> P-ISSN 2986-7940 | E-ISSN 2986-7339
- S., Deliana, Y., Dirpan, A., Sanjaya, E. H., & Kohar, U. H. A. (2025). Implementation Strategies for Green Products and Green Packaging for Tourism MSMEs to Support the SDGs. *Journal of Sustainability Research*, 7(1). <https://doi.org/10.20900/jsr20250009>

- Tan Si Min, Muhammad Zaffwan Idris, Syed Osman Syed Yusoff (2018), Exploring Small and Medium Enterprises (SMEs) Food Packaging as A Touchpoint to Promote Nation Branding at Kuala Lumpur International Airport (KLIA), *International Journal Of Academic Research in Business and Social Sciences* Vol 8, Issue 10, E-ISSN: 2222-6990
- Terzioğlu, N., Ceschin, F., Pratama, Y., Sembiring, E., & Jobling, S. (2025). *Barriers to mainstream adoption of circular packaging in Indonesia. Recycling*, 10(3), 96. <https://doi.org/10.3390/recycling10030096>
- Valensi, R., Hanafi, I., & Winoto, S. (2023). *Evaluasi Program Pelayanan Rumah Kemasan di Kabupaten Tuban* [Universitas Brawijaya]. Repository Universitas Brawijaya.
- Vinsensia, D., Utami, D., Jannah, M., & Wulandari, S. (2023). Penerapan inovasi desain kemasan sebagai branding produk UMKM. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(3), 2097–2102. doi.org
- Wawan Kurniawan, Elfira Febriani Harahap, Ida Busnetty, Rama Pangestu, Meily Cristina, (2025), Integrating Product Innovation and Sustainable Packaging to Enhance Competitiveness of Dodol SMEs, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, Vol 5, No 5

Dokumen Pemerintah, Data, dan Sumber Kelembagaan

- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. (2025). Data usaha mikro Kabupaten Lebak tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Lebak.
- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. (2026). Dokumen profil dan operasional Rumah Kemasan SINTESA Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 100 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Penerima Program Pengembangan Kemasan Produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024a). Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Penerima Program Pengembangan Kemasan Produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024b). Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 233 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemerintah

Daerah Penerima Program Pengembangan Kemasan Produk UMK melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 Tahap II.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). Data UMKM Indonesia Terlengkap: Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2024–2025. Diakses dari <https://pluang.id/kabar/data-umkm-indonesia-lengkap-sidt-oss/>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025). Kontribusi ekspor UMKM di beberapa negara ASEAN. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2025). Daftar rumah kemasan Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, GEMA. (2021). Pengembangan kemasan produk IKM. Majalah GEMA Industri Kecil Menengah dan Aneka, 72.

Kementerian UMKM Republik Indonesia. (2025a). Data UMKM di Indonesia tahun 2025. Kementerian UMKM Republik Indonesia.

Kementerian UMKM Republik Indonesia. (2025b). Survei *monitoring* layanan kemasan daerah penerima program tahun 2024. Kementerian UMKM Republik Indonesia.

Radar Banten. (2024, 10 Desember). Bupati Lebak luncurkan dan resmikan SINTESA UMKM. Radar Banten.

Rumah Kemasan SINTESA Lebak. (2026). Dokumentasi, struktur organisasi, dan profil layanan Rumah Kemasan SINTESA Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak.

Rumah Kemasan SINTESA Lebak. (2026). Rekapitulasi Produksi Kemasan UMKM 2026. Pemerintah Kabupaten Lebak.

Peraturan perundang-undangan

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kemasan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A